

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pada Badan Penanaman Modal Daerah
Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 dan PP 71 Tahun 2010

disampaikan oleh:

ZULKIFLI

A. Pendahuluan

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, penatausahaan keuangan daerah merupakan rangkaian kegiatan pencatatan, pembukuan, verifikasi, pengesahan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh pengguna anggaran, bendahara, dan pejabat pengelola keuangan daerah. Penatausahaan merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Tahap Penatausahaan pada BPMD meliputi:

1. PPTK mengajukan dokumen tagihan
2. PPK-SKPD melakukan verifikasi
3. Bendahara membuat SPP
4. PA/KPA menerbitkan SPM
5. BUD menerbitkan SP2D
6. Dana dibayarkan kepada penyedia
7. Bendahara mencatat dalam BKU
8. Transaksi dilaporkan dalam LPJ Bendahara
9. Dicatat dalam sistem akuntansi pemerintah daerah untuk penyusunan laporan keuangan.

PP Nomor 71 Tahun 2010 menjadi dasar penyusunan akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual yang digunakan dalam proses penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah

B. Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD)

Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang investasi, tugasnya sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan investasi daerah
2. Penyusunan peta potensi investasi
3. Pengelolaan sistem informasi investasi daerah
4. Promosi investasi
5. Fasilitasi investor
6. Monitoring dan evaluasi investasi
7. Penyusunan laporan kinerja investasi daerah
8. Pengelolaan data dan statistik investasi.

C. Program dan Kegiatan Tahun 2026

Pagu Anggaran	Rp8.000.000.000,-
Program	Nilai
Belanja Pegawai	Rp3.000.000.000,-
Promosi Investasi	1.200.000.000
Sistem Informasi Investasi	1.500.000.000
Monitoring Investasi	500.000.000
Pengadaan Aset Tetap	1.500.000.000
Penyusunan Kajian Investasi	300.000.000

D. Transaksi Selama Tahun 2026

1. Pengadaan Gedung Pusat Informasi Investasi, nilai kontrak Rp800.000.000,-

Jurnal

Gedung dan Bangunan Rp800.000.000,-

Kas di RKUD Rp800.000.000

Dampak

Neraca: Aset bertambah.

LO : Belum menjadi beban.

2. Pengadaan Peralatan Pusat Data Investasi: Server, komputer, jaringan, nilainya Rp500.000.000

Jurnal

Peralatan dan Mesin Rp500.000.000,-

Kas di RKUD Rp500.000.000

3. Pengembangan Aplikasi Investment Information System

BPMD mengembangkan aplikasi berbasis web untuk pelayanan investor.

Nilai kontrak Rp700.000.000. Karena pengembangan aplikasi ini memberikan manfaat lebih dari satu tahun maka dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud.

Jurnal

Aset Tak Berwujud – Software Rp700.000.000,-

Kas di RKUD Rp700.000.000

Dampak

Neraca:

Aset Tak Berwujud bertambah Rp700.000.000,-

LO:

Belum menjadi beban.

4. Penyusunan Peta Potensi Investasi, Nilai Rp250.000.000,-

Hasilnya berupa dokumen kajian yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

Jurnal

Beban Kajian Investasi Rp250.000.000,-

Kas di RKUD Rp250.000.000

5. Promosi Investasi Nasional, Investment Forum: Biaya Rp400.000.000,-

Jurnal

Beban Promosi Investasi Rp400.000.000,-

Kas di RKUD Rp400.000.000

**6. Monitoring dan Evaluasi Investasi. Perjalanan dinas dan survei lapangan
Rp150.000.000,-**

Jurnal

Beban Monitoring Investasi Rp150.000.000,-

Kas di RKUD Rp150.000.000

7. Tagihan Cloud Hosting Sistem Investasi Belum Dibayar, nilai Rp20.000.000,-

Jurnal:

Beban Hosting Sistem Rp20.000.000,-

Utang Belanja Rp20.000.000

**E. Penyusutan dan Amortisasi. Gedung Rp800.000.000,- dan umur manfaat 20 tahun.
dihitung penyusutan per tahun Rp40.000.000,-**

Jurnal

Beban Penyusutan Gedung Rp40.000.000

Akumulasi Penyusutan Gedung Rp40.000.000

Peralatan Rp500.000.000

Umur manfaat 5 tahun.

Penyusutan per tahun Rp100.000.000,-

Jurnal

Beban Penyusutan Peralatan Rp100.000.000,-

Akumulasi Penyusutan Peralatan Rp100.000.000

Software Rp700.000.000

Umur manfaat 5 tahun.

Amortisasi per tahun Rp140.000.000,-

Jurnal

Beban Amortisasi Software Rp140.000.000

Akumulasi Amortisasi Software Rp140.000.000

F. Laporan Operasional (LO)

Beban	Nilai
Beban Kajian Investasi	Rp250.000.000,-
Beban Promosi Investasi	400.000.000
Beban Monitoring Investasi	150.000.000
Beban Hosting Sistem	20.000.000
Beban Penyusutan Gedung	40.000.000
Beban Penyusutan Peralatan	100.000.000
Beban Amortisasi Software	<u>140.000.000</u>
Total Beban	1.100.000.000
Defisit Operasional	Rp1.100.000.000

G. Neraca Per 31 Desember 2026

Aset

Aset Tetap:

Gedung dan Bangunan Rp800.000.000,-

Akumulasi Penyusutan (Rp40.000.000)

Nilai Buku Rp760.000.000

Peralatan dan Mesin Rp500.000.000

Akumulasi Penyusutan(Rp100.000.000)

Nilai Buku Rp400.000.000

Aset Tak Berwujud:

Software Investasi Rp700.000.000

Akumulasi Amortisasi (Rp140.000.000)

Nilai Buku Rp560.000.000

Total Aset Rp1.720.000.000

Kewajiban

Utang Belanja Hosting **Rp 20.000.000**

Ekuitas Rp1.700.000.000

Simulasi di atas menggambarkan satu siklus akuntansi badan penunjang urusan investasi yang tidak hanya mengelola belanja operasional, tetapi juga menghasilkan aset tetap berwujud dan aset tak berwujud yang harus dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan berbasis akrual sesuai SAP PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 77 Tahun 2020.

Perbedaan perlakuan akuntansi antara pengadaan gedung pusat informasi investasi dan penyusunan kajian potensi investasi pada Badan Penanaman Modal Daerah berdasarkan PP 71 Tahun 2010!

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, terdapat perbedaan perlakuan akuntansi antara pengadaan gedung pusat informasi investasi dan penyusunan kajian potensi investasi karena keduanya memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda.

1. Pengadaan Gedung Pusat Informasi Investasi**a. Klasifikasi Akuntansi**

Pengadaan gedung pusat informasi investasi dikategorikan sebagai Aset Tetap, khususnya kelompok Gedung dan Bangunan.

b. Pengakuan

Gedung diakui sebagai aset tetap apabila:

- Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

- Nilainya dapat diukur secara andal.
- Kepemilikan atau penguasaannya telah berpindah kepada pemerintah daerah.

c. Pengukuran

Dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

- Harga kontrak pembangunan.
- Biaya perencanaan.
- Biaya pengawasan.
- Biaya perizinan.
- Biaya lain yang langsung terkait hingga gedung siap digunakan.

d. Penyajian dalam Laporan Keuangan

- Pada **Neraca** disajikan sebagai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan.
- Pada **Laporan Operasional (LO)** tidak langsung menjadi beban, melainkan dibebankan secara bertahap melalui **penyusutan** selama masa manfaat gedung.
- Pada **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)** dicatat sebagai **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**.

Contoh Jurnal:

Saat pembayaran pembangunan gedung Rp5.000.000.000

LRA

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp5.000.000.000

Estimasi Perubahan SAL Rp5.000.000.000

LO/Neraca

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp5.000.000.000

Kas di Kas Daerah Rp5.000.000.000

2. Penyusunan Kajian Potensi Investasi

a. Klasifikasi Akuntansi

Kajian potensi investasi pada umumnya dikategorikan sebagai Belanja Barang dan Jasa karena hasil kajian tidak memenuhi kriteria pengakuan aset tetap.

b. Pengakuan

Biaya penyusunan kajian diakui sebagai beban pada saat jasa kajian diterima atau manfaat ekonominya telah digunakan.

c. Pengukuran

Dicatat sebesar nilai kontrak atau biaya yang dibayarkan kepada konsultan atau tim penyusun.

d. Penyajian dalam Laporan Keuangan

- Pada **LRA** disajikan sebagai **Belanja Barang dan Jasa**.
- Pada **LO** disajikan sebagai **Beban Jasa/Konsultansi**.
- Tidak dicatat sebagai aset tetap dalam Neraca, kecuali memenuhi kriteria tertentu sebagai aset tak berwujud (yang dalam praktik kajian investasi umumnya tidak memenuhi kriteria tersebut).

Contoh Jurnal:

Pembayaran kajian potensi investasi Rp200.000.000,-

LRA

Belanja Barang dan Jasa	Rp200.000.000,-
Estimasi Perubahan SAL	Rp200.000.000

LO

Beban Jasa Konsultansi	Rp200.000.000,-
Kas di Kas Daerah	Rp200.000.000

Perbedaan Utama

Aspek	Pengadaan Gedung Pusat Informasi Investasi	Penyusunan Kajian Potensi Investasi
Jenis Belanja	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa
Pengakuan Neraca	Diakui sebagai Aset Tetap	Tidak diakui sebagai aset
Dampak LO	Menjadi beban melalui penyusutan	Langsung menjadi beban
Masa Manfaat	Lebih dari 1 tahun	Habis pada saat digunakan
Kelompok Aset	Gedung dan Bangunan	Tidak ada
Dasar SAP	PSAP 07 Aset Tetap	PSAP 02 LRA dan PSAP 12 LO

Menurut PP 71 Tahun 2010, pengadaan gedung pusat informasi investasi merupakan belanja modal yang menghasilkan aset tetap dan dicatat dalam Neraca serta disusutkan selama masa manfaatnya. Sebaliknya, penyusunan kajian potensi investasi merupakan belanja barang dan jasa yang manfaatnya langsung dikonsumsi sehingga diakui sebagai beban pada periode berjalan dan tidak dicatat sebagai aset tetap.

Soal Pilihan Ganda

1. Tujuan utama penerapan akuntansi berbasis akrual pada Badan Penanaman Modal Daerah adalah
 - A. Menyederhanakan laporan keuangan
 - B. Mengakui transaksi hanya saat kas diterima atau dibayar
 - C. Menyajikan informasi keuangan secara lengkap mengenai aset, kewajiban, pendapatan dan beban
 - D. Menghilangkan pencatatan aset tetap
2. Pengadaan Gedung Pusat Informasi Investasi sebesar Rp800.000.000 dicatat sebagai
 - A. Beban Promosi Investasi
 - B. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

- C. Beban Modal
 - D. Persediaan
3. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Investasi yang digunakan selama lima tahun dikategorikan sebagai
- A. Persediaan
 - B. Belanja Barang Habis Pakai
 - C. Aset Tak Berwujud
 - D. Beban Operasional
4. Biaya penyusunan kajian potensi investasi yang tidak memenuhi kriteria aset dicatat sebagai
- A. Aset Tetap
 - B. Beban Kajian Investasi
 - C. Persediaan
 - D. Investasi Permanen
5. Tagihan hosting aplikasi investasi yang belum dibayar pada akhir tahun harus diakui sebagai
- A. Kas
 - B. Piutang
 - C. Beban dan Utang Belanja
 - D. Pendapatan
6. Jika software investasi senilai Rp600.000.000 memiliki umur manfaat 5 tahun, maka amortisasi per tahun adalah
- A. Rp60.000.000
 - B. Rp100.000.000
 - C. Rp120.000.000
 - D. Rp150.000.000

7. Laporan yang menyajikan seluruh beban promosi investasi dan monitoring investasi adalah
- A. Neraca
 - B. Laporan Operasional
 - C. Laporan Arus Kas
 - D. Laporan Perubahan SAL
8. Penyusutan gedung investasi dicatat dengan jurnal
- A. Debit Beban Penyusutan, Kredit Akumulasi Penyusutan
 - B. Debit Kas, Kredit Pendapatan
 - C. Debit Utang, Kredit Kas
 - D. Debit Aset Tetap, Kredit Kas
9. Berikut yang termasuk aset tetap berwujud pada BPMD adalah
- A. Software investasi
 - B. Hak cipta aplikasi
 - C. Gedung pusat informasi investasi
 - D. Lisensi aplikasi
10. Salah satu tugas BPMD adalah
- A. Mengelola pendidikan dasar
 - B. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan
 - C. Menyusun kebijakan dan promosi investasi daerah
 - D. Menyelenggarakan pemungutan pajak pusat
11. Aset tak berwujud disajikan dalam
- A. Laporan Operasional
 - B. Neraca
 - C. Laporan Arus Kas
 - D. Laporan Perubahan SAL

12. Monitoring dan evaluasi investasi sebesar Rp100.000.000 dicatat sebagai
- A. Aset Tetap
 - B. Beban Monitoring Investasi
 - C. Persediaan
 - D. Utang Jangka Panjang
13. Akumulasi penyusutan berfungsi untuk
- A. Menambah nilai aset
 - B. Mengurangi nilai buku aset tetap
 - C. Menambah kas daerah
 - D. Menambah pendapatan daerah
14. Pengakuan beban hosting sebesar Rp20.000.000 yang belum dibayar merupakan penerapan prinsip
- A. Basis Kas
 - B. Prudence
 - C. Basis Akrua
 - D. Konsolidasi
15. Software investasi senilai Rp700.000.000 dicatat pertama kali pada akun
- A. Beban Software
 - B. Persediaan
 - C. Aset Tak Berwujud
 - D. Utang Belanja
16. Yang bukan merupakan karakteristik aset tetap adalah
- A. Digunakan dalam kegiatan pemerintah
 - B. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
 - C. Dibeli untuk dijual kembali
 - D. Dapat diukur secara andal

17. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur tentang
- A. Pengelolaan Keuangan Daerah
 - B. Pemerintahan Desa
 - C. Pajak Penghasilan
 - D. Badan Usaha Milik Negara
18. Jika gedung investasi senilai Rp1.000.000.000 memiliki umur manfaat 20 tahun, maka penyusutan per tahun adalah
- A. Rp20.000.000
 - B. Rp40.000.000
 - C. Rp50.000.000
 - D. Rp100.000.000
19. Kewajiban BPMD yang belum dibayar kepada penyedia jasa dicatat sebagai
- A. Piutang
 - B. Ekuitas
 - C. Utang Belanja
 - D. Pendapatan
20. Pada akhir tahun BPMD wajib menyusun laporan berikut, kecuali
- A. Laporan Operasional
 - B. Neraca
 - C. Catatan atas Laporan Keuangan
 - D. Laporan Laba Rugi Perusahaan

KASUS KOMPREHENSIF 1

Pengembangan Sistem Informasi Investasi dan Promosi Investasi Daerah

Latar Belakang

Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Maju memiliki tugas menyusun kebijakan investasi, promosi investasi, pengelolaan data investasi dan fasilitasi investor.

Pada Tahun Anggaran 2026, BPMD melaksanakan kegiatan berikut:

1. Mengembangkan Sistem Informasi Investasi Daerah (SIID) senilai Rp900.000.000.
2. Melaksanakan Investment Forum Nasional sebesar Rp400.000.000.
3. Membeli server dan perangkat jaringan sebesar Rp500.000.000.
4. Membayar biaya perjalanan dinas monitoring investasi sebesar Rp100.000.000.
5. Menerima tagihan cloud hosting aplikasi sebesar Rp30.000.000 yang belum dibayar sampai 31 Desember 2026.
6. Software SIID diperkirakan memiliki umur manfaat 5 tahun.
7. Server memiliki umur manfaat 5 tahun.

Pertanyaan

A. Identifikasi transaksi yang menghasilkan:

1. **Aset Tetap**
2. **Aset Tak Berwujud**
3. **Beban Operasional**
4. **Kewajiban**

B. Buat jurnal akuntansi berbasis akrual.

C. Hitung amortisasi dan penyusutan tahun pertama.

D. Susun Laporan Operasional.

E. Jelaskan bentuk pertanggungjawaban BPMD sesuai PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 77 Tahun 2020.

JAWABAN KASUS 1

A. Klasifikasi Transaksi

Transaksi	Nilai	Klasifikasi
Software SIID	Rp900 juta	Aset Tak Berwujud
Server	Rp500 juta	Aset Tetap
Investment Forum	Rp400 juta	Beban Operasional
Monitoring Investasi	Rp100 juta	Beban Operasional
Hosting	Rp30 juta	Beban dan Kewajiban

B. Jurnal

Pengembangan Software

Aset Tak Berwujud Rp900.000.000

Kredit Kas Rp900.000.000

Pengadaan Server

Peralatan dan Mesin Rp500.000.000

Kas Rp500.000.000

Promosi Investasi

Beban Promosi Investasi Rp400.000.000

Kas Rp400.000.000

Monitoring Investasi

Beban Monitoring Investasi Rp100.000.000

Kas Rp100.000.000

Hosting Belum Dibayar

Beban Hosting Rp30.000.000

Utang Belanja Rp30.000.000

C. Penyusutan dan Amortisasi

Software

Rp900.000.000 ÷ 5 tahun = Rp180.000.000

Beban Amortisasi Rp180.000.000

Akumulasi Amortisasi Rp180.000.000

Server

Rp500.000.000 ÷ 5 tahun= Rp100.000.000

Beban Penyusutan Rp100.000.000

Akumulasi Penyusutan Rp100.000.000

D. Laporan Operasional

Promosi Investasi Rp400.000.000

Monitoring Investasi Rp100.000.000

Hosting Rp30.000.000

Penyusutan Server Rp100.000.000

Amortisasi Software Rp180.000.000

Total Beban Rp810.000.000

Defisit Operasional Rp810.000.000

E. Bentuk Pertanggungjawaban BPMD Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan aset melalui penyusunan laporan keuangan yang menjadi bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah.

1. Pertanggungjawaban dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dibandingkan dengan anggarannya.

Realisasi belanja BPMD Tahun 2026:

Uraian	Nilai (Rp)	Klasifikasi
Pengembangan SIID	900.000.000	Belanja Modal Aset Tak Berwujud
Investment Forum Nasional	400.000.000	Belanja Barang dan Jasa
Pembelian Server dan Jaringan	500.000.000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Perjalanan Dinas Monitoring Investasi	100.000.000	Belanja Barang dan Jasa
Tagihan Cloud Hosting (belum dibayar)	-----	Tidak muncul dalam LRA karena belum dibayar
Total Realisasi Belanja	1.900.000.000	

Penjelasan:

- LRA menggunakan basis kas.
- Tagihan cloud hosting yang belum dibayar sampai 31 Desember 2025 tidak dicatat dalam realisasi belanja LRA.

2. Pertanggungjawaban dalam Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan seluruh beban berbasis akrual yang terjadi selama tahun berjalan.

- a. Beban Forum Investasi Rp400.000.000
- b. Beban Perjalanan Dinas Rp100.000.000
- c. Beban Cloud Hosting Rp30.000.000, karena jasa telah diterima walaupun belum dibayar.
- d. Beban Amortisasi SIID. Nilai software SIID Rp900.000.000

Umur manfaat 5 tahun

Amortisasi per tahun = $\text{Rp}900.000.000 \div 5 = \text{Rp}180.000.000$

e. Beban Penyusutan Server

Nilai server = Rp500.000.000

Umur manfaat 5 tahun

Penyusutan per tahun = $\text{Rp}500.000.000 \div 5 = \text{Rp}100.000.000$

Total Beban LO:

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Forum Investasi	400.000.000
Beban Perjalanan Dinas	100.000.000
Beban Cloud Hosting	30.000.000
Beban Amortisasi SIID	180.000.000
Beban Penyusutan Server	100.000.000
Total Beban LO	810.000.000

3. Pertanggungjawaban dalam Neraca

Aset Tetap

Server dan jaringan:

$\text{Rp}500.000.000 - \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}400.000.000$

Aset Tak Berwujud

Software SIID:

Rp900.000.000 – Rp180.000.000= Rp720.000.000

Kewajiban

Utang cloud hosting Rp30.000.000

Posisi Neraca per 31 Desember 2026

Uraian	Nilai (Rp)
Aset Tak Berwujud (SIID)	720.000.000
Aset Tetap Server	400.000.000
Total Aset	1.120.000.000
Utang Cloud Hosting	30.000.000
Ekuitas	1.090.000.000
Total Utang dan Ekuitas	1.120.000.000

4. Pertanggungjawaban dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menjelaskan perubahan ekuitas akibat:

- Surplus/defisit operasional.
- Koreksi aset.
- Penyesuaian lainnya.

Dalam kasus BPMD:

- Amortisasi software Rp180.000.000,-
- Penyusutan server Rp100.000.000
- Beban cloud hosting Rp30.000.000

Seluruh beban tersebut mengurangi ekuitas pemerintah daerah.

5. Pertanggungjawaban dalam Laporan Arus Kas (LAK)

Karena BPMD merupakan OPD, transaksi kasnya akan dikonsolidasikan ke dalam LAK Pemerintah Daerah.

❖ **Arus kas keluar kegiatan operasi:**

- Forum investasi Rp400.000.000,-
- Perjalanan dinas Rp100.000.000

❖ **Arus kas keluar kegiatan investasi:**

- Pengembangan SIID Rp900.000.000,-
- Pembelian server Rp500.000.000

Total kas keluar Rp1.900.000.000,-

6. Pertanggungjawaban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Menurut PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 77 Tahun 2020, BPMD wajib mengungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan
- b. Dasar kapitalisasi software SIID sebagai aset tak berwujud
- c. Dasar kapitalisasi server sebagai aset tetap
- d. Metode amortisasi software (garis lurus)
- e. Metode penyusutan server (garis lurus)
- f. Rincian kegiatan Investment Forum Nasional
- g. Rincian utang cloud hosting Rp30.000.000,-
- h. Informasi aset yang digunakan untuk pelayanan investasi daerah.

Kesimpulan

Sesuai PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 77 Tahun 2020, BPMD harus mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan aset melalui:

1. **LRA** → merealisasikan belanja sebesar Rp1.900.000.000,-
2. **LO** → mengakui beban sebesar Rp810.000.000
3. **Neraca** → menyajikan aset sebesar Rp1.120.000.000 dan utang Rp30.000.000

4. **LPE** → menjelaskan perubahan ekuitas akibat beban dan penyusutan/amortisasi.
5. **LAK** → melaporkan arus kas keluar sebesar Rp1.900.000.000
6. **CaLK** → mengungkapkan rincian transaksi, aset, kewajiban, serta kebijakan akuntansi yang digunakan.

Dengan demikian, BPMD tidak hanya mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, tetapi juga wajib mempertanggungjawabkan aset, kewajiban dan kinerja keuangan secara akrual sesuai SAP berbasis akrual.

KASUS KOMPREHENSIF 2

Pusat Layanan Investor dan Kajian Potensi Investasi

Latar Belakang

BPMD Kota Jaya melaksanakan program peningkatan investasi daerah melalui pembangunan Pusat Layanan Investor Terpadu.

Transaksi yang terjadi:

1. Membangun gedung pusat layanan investor Rp2.000.000.000,-
2. Mengadakan perangkat komputer pelayanan Rp300.000.000
3. Menyusun Kajian Potensi Kawasan Industri Rp250.000.000
4. Menyelenggarakan Roadshow Investasi Rp350.000.000
5. Membeli lisensi database investor internasional Rp150.000.000 dengan masa manfaat 3 tahun
6. Tagihan listrik dan internet akhir tahun Rp25.000.000 belum dibayar
7. Gedung memiliki umur manfaat 20 tahun
8. Komputer memiliki umur manfaat 5 tahun.

Pertanyaan

A. Tentukan transaksi yang termasuk:

1. Aset Tetap

2. Aset Tak Berwujud

3. Beban

4. Kewajiban

B. Buat jurnal akuntansi seluruh transaksi

C. Hitung penyusutan dan amortisasi

D. Analisis dampak transaksi terhadap LO dan Neraca.

Jawaban Kasus Komprehensif 2:

A. Klasifikasi Transaksi

1. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.

No	Transaksi	Nilai (Rp)
1	Gedung Pusat Layanan Investor	2.000.000.000,-
2	Perangkat Komputer Pelayanan	300.000.000
Total Aset Tetap Rp2.300.000.000		

2. Aset Tak Berwujud (ATB)

ATB adalah aset nonkeuangan yang tidak mempunyai bentuk fisik dan memberikan manfaat ekonomi/jasa lebih dari satu periode.

No	Transaksi	Nilai (Rp)
5	Lisensi Database Investor Internasional	150.000.000,-
Total ATB Rp150.000.000		

3. Beban

No	Transaksi	Nilai (Rp)
3	Kajian Potensi Kawasan Industri	250.000.000
4	Roadshow Investasi	350.000.000
Total Beban Operasional Rp600.000.000		

4. Kewajiban

No	Transaksi	Nilai (Rp)
6	Utang Listrik dan Internet	25.000.000
Total Kewajiban Rp25.000.000		

B. Jurnal Akuntansi

1. Pembangunan Gedung Pusat Layanan Investor

Jurnal LO/Neraca

Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	Rp2.000.000.000,-
Kas di Kas Daerah	Rp2.000.000.000

2. Pengadaan Komputer Pelayanan

Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	Rp300.000.000,-
Kas di Kas Daerah	Rp300.000.000

3. Penyusunan Kajian Potensi Kawasan Industri

Beban Jasa Konsultansi	Rp250.000.000,-
Kas di Kas Daerah	Rp250.000.000

4. Roadshow Investasi

Beban Promosi Investasi	Rp350.000.000,-
Kas di Kas Daerah	Rp350.000.000

5. Pembelian Lisensi Database Investor

Aset Tak Berwujud	Rp150.000.000,-
Kas di Kas Daerah	Rp150.000.000

6. Tagihan Listrik dan Internet Belum Dibayar

Beban Utilitas	Rp25.000.000,-
Utang Beban	Rp 25.000.000

C. Perhitungan Penyusutan dan Amortisasi

1. Penyusutan Gedung

Harga Perolehan = Rp2.000.000.000

Umur Manfaat = 20 Tahun

Penyusutan per tahun = $\text{Rp}2.000.000.000 \div 20 = \text{Rp}100.000.000$

2. Penyusutan Komputer

Harga Perolehan = Rp300.000.000

Umur Manfaat = 5 Tahun

Penyusutan per tahun = $\text{Rp}300.000.000 \div 5 = \text{Rp}60.000.000$

3. Amortisasi Lisensi Database

Harga Perolehan = Rp150.000.000

Umur Manfaat = 3 Tahun

Amortisasi per tahun = $\text{Rp}150.000.000 \div 3 = \text{Rp}50.000.000$

Jurnal Penyusutan dan Amortisasi

Gedung

Beban Penyusutan Gedung	Rp100.000.000
Akumulasi Penyusutan Gedung	Rp100.000.000

Komputer

Beban Penyusutan Komputer Rp60.000.000

Akumulasi Penyusutan Komputer Rp60.000.000

Lisensi

Beban Amortisasi Rp50.000.000

Akumulasi Amortisasi Rp50.000.000

D. Dampak Terhadap LO dan Neraca

1. Dampak terhadap Laporan Operasional (LO)

Beban Tahun Berjalan

Uraian	Nilai (Rp)
Kajian Potensi Kawasan Industri	250.000.000
Roadshow Investasi	350.000.000
Beban Listrik dan Internet	25.000.000
Penyusutan Gedung	100.000.000
Penyusutan Komputer	60.000.000
Amortisasi Lisensi	50.000.000
Total Beban LO	835.000.000

Dampak:

LO menunjukkan beban operasional sebesar Rp835.000.000, yang akan menurunkan surplus operasional pemerintah daerah.

2. Dampak terhadap Neraca

Aset Tetap

<u>Uraian</u>	<u>Nilai (Rp)</u>
Gedung	2.000.000.000
(-) Akumulasi Penyusutan	(100.000.000)
Nilai Buku Gedung	1.900.000.000

<u>Uraian</u>	<u>Nilai (Rp)</u>
Komputer	300.000.000
(-) Akumulasi Penyusutan	(60.000.000)
Nilai Buku Komputer	240.000.000

Aset Tak Berwujud

<u>Uraian</u>	<u>Nilai (Rp)</u>
Lisensi Database	150.000.000
(-) Akumulasi Amortisasi	(50.000.000)
Nilai Buku Lisensi	100.000.000

Total Aset:

$\text{Rp}1.900.000.000 + \text{Rp}240.000.000 + \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}2.240.000.000$

Kewajiban

Utang listrik dan internet= $\text{Rp}25.000.000$

E. Hubungan Transaksi dengan Tupoksi BPMD

Berdasarkan tugas BPMD yaitu merumuskan kebijakan investasi, promosi investasi, pelayanan investor, pengelolaan data investasi dan fasilitasi penanaman modal, maka hubungan transaksi dengan tupoksi adalah:

Transaksi	Hubungan dengan Tupoksi BPMD
➤ Gedung Pusat Layanan Investor	➤ Mendukung pelayanan perizinan dan fasilitasi investor secara terpadu.
➤ Komputer Pelayanan	➤ Mendukung digitalisasi pelayanan investasi dan pengelolaan data investor.
➤ Kajian Potensi Kawasan Industri	➤ Menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan investasi daerah.
➤ Roadshow Investasi	➤ Merupakan kegiatan promosi investasi untuk menarik investor baru.
➤ Lisensi Database Investor Internasional	➤ Mendukung pengumpulan informasi pasar dan calon investor global.
➤ Listrik dan Internet	➤ Menunjang operasional pelayanan investasi dan komunikasi dengan investor

Penutup

- ❖ Kedua kasus menunjukkan bahwa BPMD sebagai perangkat daerah penunjang urusan investasi tidak hanya mengelola belanja operasional, tetapi juga menghasilkan aset tetap berwujud dan aset tak berwujud yang harus diakui, diukur, disusutkan atau diamortisasi sesuai SAP berbasis akrual.

